BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori tentang Desa

2.1.1 Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Selain itu, pengertian desa dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek morfologi, aspek jumlah penduduk, aspek ekonomi dan aspek sosial-budaya serta aspek hukum (Wasistiono, 2007).

A. Aspek morfologi, desa ialah pemanfaatan lahan atau tanah oleh penduduk yang bersifat agraris, serta bangunan rumah yang terpencar.

B. Aspek jumlah penduduk, desa didiami oleh sejumlah kecil penduduk dengan kepadatan yang rendah.

C. Aspek ekonomi, desa ialah penduduk yang bermata pencarian pokok di bidang pertanian, bercocok tanam, atau nelayan.

D. Aspek sosial-budaya, desa itu tampak dari hubungan sosial antar penduduknya yang bersifat khas, yakni hubungan kekeluargaan, bersifat pribadi, bersifat homogen serta begotong-royong.

E. Aspek hukum, desa merupakan kesatuan wilayah hukum tersendiri.

Pengertian tersebut digunakan sebagai dasar untuk memperkuat ruang lingkup wilayah penelitian yaitu berupa desa.

2.1.2 Karakteristrik Umum Pedesaan

Secara umum, desa memiliki beberapa karakteristik yang terdiri dari karakteristik fisik, sosial dan ekonomi (Jayadinata, 1992).

A. Karakteristrik fisik pedesaan

Desa secara umum memiliki beberapa karakteristik fisik, diantaranya yaitu:

1. Terdapat perbandingan antara jumlah manusia dengan luas tanah kecil (*man land ratio* kecil).

2. Tata guna tanah didominasi untuk sektor pertanian.
3. Jenis dan teknik pertanian ditentukan oleh letak desa (kota, pegunungan, dan pantai).

B. Karakteristik sosial pedesaan

Karakteristik sosial terdiri dari:

1. Hubungan masyarakat yang erat dan mendalam.
2. Cara bertani masyarakat desa yang masih sangat tradisional dan tidak efisien.
3. Golongan orang tua pada masyarakat memegang peranan penting.
4. Pengaruh tokoh masyarakat lebih besar dari penguasa.

C. Karakteristik ekonomi desa

Karakteristik ekonomi masyarakat pedesaan diantaranya yaitu:

1. Ketergantungan kepada kota dalam hal pemasaran dan modal.
2. Lapangan kerja utama disektor pertanian dan pengolahan hasil dari pertanian.
3. Teknologi sederhana, skala kecil dan menengah, permasalahan modal dan pemasaran.

Karakteristik umum pedesaan menurut teori digunakan untuk mendukung hasil temuan karakteristik yang akan diidentifikasi di wilayah studi berdasarkan aspek sarana, prasarana dan sosial ekonomi.

2.2 Tinjauan Teori Desa Tertinggal

2.2.1 Pengertian Desa Tertinggal

Lingkup daerah tertinggal dalam penelitian ini yaitu berupa kawasan pedesaan yang memiliki ketertinggalan pada beberapa aspek. Berdasarkan Panduan Identifikasi Desa Terpencil, Desa Tertinggal, dan Pulau-pulau Kecil tahun 2007, yang disusun oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, desa tertinggal merupakan kawasan pedesaan yang ketersediaan sarana dan prasarana dasar wilayahnya kurang atau tidak ada (tertinggal) sehingga menghambat pertumbuhan/perkembangan kehidupan masyarakatnya dalam bidang ekonomi (kemiskinan) dan bidang pendidikan (keterbelakangan).

2.2.2 Kriteria Desa Tertinggal

Berdasarkan Panduan Identifikasi Desa Terpencil, Desa Tertinggal, dan Pulau-pulau Kecil tahun 2007, yang disusun oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Desa tertinggal memiliki beberapa kriteria, diantaranya yaitu:

A. Daerah perdesaan (unit administratif desa)

B. Prasarana dasar wilayah kurang/ tidak ada:
   1. Air bersih,
   2. Listrik,
   3. Irigasi

C. Sarana wilayah kurang/ tidak ada:
   1. Sarana ekonomi: (pasar, pertokoan, PKL, industri)
   2. Sarana sosial: (kesehatan dan pendidikan)
   3. Sarana transportasi: (terminal, stasiun, bandara, dll)

D. Perekonomian masyarakat rendah (miskin/ pra sejahtera).

E. Tingkat pendidikan rendah (terbelakang/ pendidikan kurang dari 9 tahun).

F. Produkitivitas masyarakat rendah (pengangguran pada usia produktif).

2.2.2 Parameter Desa Tertinggal

Untuk desa tertinggal, penetapan parameter sebagai indikator kuantitatif untuk tiap kriteria yang bersifat kualitatif yaitu:

A. Kawasan permukiman
   1. Kriteria: kawasan perdesaan
      Parameter: unit administratif desa

B. Prasarana dasar wilayah
   1. Kriteria: jaringan air bersih
      Parameter: pelayanan terhadap luas kawasan kurang dari 25 %
   2. Kriteria: jaringan listrik
      Parameter: pelayanan terhadap luas kawasan kurang dari 25 %
   3. Kriteria: jaringan irigasi teknis dan semi teknis
      Parameter: pelayanan terhadap luas kawasan kurang dari 25 %

C. Sarana Wilayah
   1. Kriteria: sarana ekonomi (pasar, pertokoan, PKL, dll)

Parameter: pelayanan terhadap luas kawasan kurang dari 25 %

2. Kriteria: sarana industri (industri RT, industri menengah, industri besar)

   Parameter: pelayanan terhadap luas kawasan kurang dari 25 %

3. Kriteria: sarana kesehatan (RSUD, puskemas, pustu, dll)

   Parameter: pelayanan terhadap luas kawasan kurang dari 25 %

4. Kriteria: sarana pendidikan (TK, SD, SMP, SMU)

   Parameter: pelayanan terhadap luas kawasan kurang dari 25 %

5. Kriteria: sarana transportasi (terminal, stasiun)

   Parameter: pelayanan terhadap luas kawasan kurang dari 25 %

D. Kondisi Kehidupan Masyarakat

1. Kriteria: perekonomian masyarakat

   Parameter: jumlah penduduk miskin lebih dari 50 %

2. Kriteria: tingkat pendidikan

   Parameter: tingkat pendidikan penduduk kurang dari SMP lebih dari 50%

3. Kriteria: produktivitas masyarakat

   Parameter: penduduk menganggur lebih dari 50%

Kriteria dan parameter desa tertinggal merupakan komponen untuk mengetahui tipologi serta aspek ketertinggalan desa yang akan dibahas dalam penelitian ini.

2.2.3 Faktor Penyebab Desa Tertinggal

Suatu daerah dikategorikan sebagai daerah tertinggal, karena beberapa faktor penyebab (Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal), antara lain :

A. Geografis. Umumnya secara geografis daerah tertinggal relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/pegunungan, kepulauan, pesisir, dan pulau-pulau terpencil atau karena faktor geomorfologis lainnya sehingga sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupun media komunikasi.

B. Sumberdaya alam. Beberapa daerah tertinggal tidak memiliki potensi sumberdaya alam, daerah yang memiliki sumberdaya alam yang besar namun lingkungan sekitarnya merupakan daerah yang dilindungi atau tidak dapat dieksploitasi, dan daerah tertinggal akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan.

C. Sumberdaya manusia. Pada umumnya masyarakat di daerah tertinggal mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah serta kelembagaan adat yang belum berkembang.

D. Prasarana dan sarana. Keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya yang menyebabkan masyarakat di daerah tertinggal tersebut mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.

E. Daerah rawan bencana dan konflik sosial. Hal ini menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi.

F. Kebijakan pembangunan. Kebijakan pembangunan yang tidak tepat menyebabkan pembangunan daerah tertinggal menjadi terhambat.

Penjeasan tersebut digunakan peneliti untuk mengetauhi faktor-faktor yang mempengaruhi ketertinggalan desa yang akan diuji di wilayah studi.

2.2.4 Tinjauan Aspek Ketertinggalan Desa

A. Aspek Sarana

1. Sarana Ekonomi

   Berdasarkan standar Pedoman Teknis Pembangunan dan Sarana Lingkungan Perumahan Pedesaan dan Kota Kecil tahun 2000 oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, sarana perdagangan terdiri dari warung, toko, dan pasar.

   a. Warung. Warung berfungsi untuk menjual barang kebutuhan sehari-hari dan makanan siap saji dengan minimum didukung 250 penduduk.
   b. Toko. Toko berfungsi untuk menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari yang beragam dan memiliki jumlah penduduk pendukung sebanyak 2.500 jiwa.
   c. Pasar. Pasar merupakan tempat untuk jual beli barang dengan jumlah penduduk pendukung sebanyak 30.000 jiwa.

   Untuk mengetahui tingkat pelayanan dari sarana ini dibutuhkan data jumlah sarana ekonomi dan jumlah penduduk di wilayah studi.

2. Sarana Industri

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumberdaya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindsutrian). Adanya kegiatan industri dalam suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa hal (High Smith dalam Octalia, 2008), diantaranya yaitu:

a. Faktor sumber daya, khususnya sumberdaya alam sebagai pendukung industri yang penting diantaranya adalah:
   i. Bahan mentah.
   ii. Sumber energi.
   iii. Penyediaan air.
   iv. Iklim dan bentuk lahan.
b. Faktor-faktor sosial yang berpengaruh terhadap usaha dan perkembangan industri antara lain:
   i. Penyediaan tenaga kerja.
   ii. Keterampilan dan kemampuan teknologi.
   iii. Kemampuan berorganisasi (*Management*).
c. Faktor-faktor ekonomi yang penting dalam perkembangan suatu industri adalah:
   i. Pemasaran.
   ii. Transportasi.
   iii. Modal.
   iv. Nilai dan harga tanah.
d. Faktor terakhir yang sangat berpengaruh dalam perkembangan suatu industri adalah faktor kebijakan pemerintah. Faktor kebijakan pemerintah yang mempengaruhi perkembangan industri ini diantaranya adalah, ketentuan perpajakan dan tarif impor-ekspor, pembatasan jumlah dan macam industri, penentuan daerah industri, serta pengembangan kondisi dan iklim yang menguntungkan usaha.

3. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dasar penyediaan sarana ini adalah didasarkan jumlah penduduk yang dilayani oleh sarana tersebut. Untuk pembahasan desa tertinggal ini sarana kesehatan yang termasuk yaitu balai pengobatan, balai kesehatan ibu dan anak, puskesmas, praktek dokter dan apotik. Berikut merupakan standar pelayanan berdasarkan Standar Pedoman Teknis Pembangunan dan Sarana Lingkungan Perumahan Pedesaan dan Kota Kecil tahun 2000 oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Jawa Timur:

a. Balai Pengobatan. Sarana ini memberikan pelayanan kepada penduduk dalam bidang kesehatan dengan titik berat terletak pada penyembuhan (*currative*) tanpa perawatan, berobat dan pada waktu-waktu tertentu juga untuk vaksinasi. Sarana ini memiliki jumlah penduduk pendukung sebanyak 3.000 jiwa.
b. Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA). Sarana ini berfungsi melayani ibu baik sebelum, pada saat dan sesudah melahirkan serta melayani anak usia sampai dengan 6 tahun. Sarana ini memiliki jumlah penduduk pendukung sebanyak 10.000 jiwa.
c. Puskesmas. Sarana ini berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kepada penduduk dalam penyembuhan penyakit, selain melaksanakan program pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit di wilayah kerjanya. Sarana ini memiliki jumlah penduduk pendukung sebanyak 120.000 jiwa.
d. Praktek Dokter. Salah satu sarana yang memberikan pelayanan kesehatan secara individual dan lebih dititikberatkan pada usaha penyembuhan tanpa perawatan. Sarana ini memiliki jumlah penduduk pendukung sebanyak 5.000 jiwa.
e. Apotik. Sarana berfungsi untuk melayani penduduk dalam pengadaan obat-obatan, baik untuk penyembuhan maupun pencegahan. Sarana ini memiliki jumlah penduduk pendukung sebanyak 10.000 jiwa.

4. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan dalam pembahasan desa tertinggal ini terdiri dari taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA). Berikut merupakan standar pelayanan dari masing-masing sarana.

a. Taman Kanak-Kanak (TK)

TK merupakan penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar pada tingkatan pra belajar. Sarana ini memiliki jumlah penduduk pendukung sebanyak 1.000 jiwa.

b. Sekolah Dasar (SD)

SD merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program enam tahun. Sarana ini memiliki jumlah penduduk pendukung sebanyak 1.600 jiwa.

c. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

SMP merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan proram tiga tahun sesudah sekolah dasar (SD). Sarana ini memiliki jumlah penduduk pendukung sebanyak 4.800 jiwa.

d. Sekolah Menengah Atas (SMA)

SMA merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan menengah mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi. Sarana ini memiliki jumlah penduduk pendukung sebanyak 6.000 jiwa.

5. Sarana Transportasi

Transportasi diartikan sebagai kegiatan mengangkut dan mimindahkan muatan (barang dan orang) dari suatu tempat (tempat asal) ke tempat lainnya (tempat tujuan). Adanya sarana transportasi ini dikarenakan adanya kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia akan terpaksa melakukan pergerakan (mobilisasi) dari tata guna lahan yang satu ke tata guna lahan lainnya. Agar mobilisasi manusia antar tata guna lahan ini terjamin kelancarannya, maka diperlukan perlu

pengembangan system transportasi yang baik (Miro, 2005). Salah satu komponen sistem transportasi tersebut yaitu keberadaan aspek prasarana penunjang seperti jaringan jalan serta fasilitas lainnya (terminal, stasiun, bandara). Komponen ini yang akan dijadikan sebagai karaktersitik transportasi serta kriteria penentuan tipologi desa tertinggal.

B. Aspek Prasarana

1. Prasarana Air Bersih

Air merupakan kebutuhan pokok manusia yang mutlak harus dipenuhi untuk kalangsungan hidupnya. Penyediaan air bersih dalam permukiman merupakan prasarana untuk mendukung perkembangan penghuninya. Air bersih di permukiman harus tersedia dengan baik dalam arti kualitas memenuhi standar, jumlah cukup, tersedia secara terus menerus dan cara mendapatnya mudah dan terjangkau, dimana menjadikan penghuni permukiman akan nyaman tinggal. Dengan kondisi ini menjadikan masyarakat yang tinggal di permukiman tersebut dapat beraktivitas dengan baik tanpa tergganggu dengan masalah air bersih. Kebutuhan air bersih setiap masyarakat berbeda-beda. Hal ini juga berpengaruh terhadap pelayanan air bersih. Menurut Hakim (2010: 57), dan Sugiarto (2006: 51) pemakaian air bersih perkapita dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

a. Keadaan sistem penyediaan air bersih
b. Persebaran permukiman penduduk

2. Prasarana Jaringan Listrik

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu kriteria dari desa tertinggal yaitu ketersediaan prasarana listrik yang kurang. Berdasarkan kondisi ini maka pemerintah berkewajiban untuk menyediakan prasarana jaringan listrik dengan pengusahaan sesuai karakteristik dari desa tersebut.

3. Prasarana Jaringan Irigasi

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi. Berdasarkan jenis bangunan dan kemampuan untuk pengaturan debit air, irigasi diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. Irigasi teknis: pengairannya diperoleh dari sumber air yang dialirkan melalui jaringan irigasi yang lengkap dan permanen dan didistribusikan secara terukur.
b. Irigasi Semi Teknis: pengairannya diperoleh dari dari sumber air yang dialirkan melalui jaringan irigasi yang tidak lengkap dan atau semi permanen, sehingga tidak dapat diatur sepenuhnya dan tidak terukur.
c. Irigasi sederhana: pengairannya diperoleh dari dari sumber air yang dialirkan melalui jaringan irigasi non permanen dan atau pengaturan secara tradisional.
d. Lahan sawah irigasi Non PU: pengairannya dari sistem pengairan yang dikelola sendiri oleh masyarakat atau irigasi desa.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 498/KPTS/M/2005 tentang Penguatan Masyarakat Petani Pemakai Air dalam Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, pelayanan jaringan irigasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

a. Pola tanam. Pola tanam berkaitan dengan urutan tanam pada sebidang lahan pertanian dalam jangka waktu satu tahun, termasuk di dalamnya masa pengolahan lahan.
b. Jenis Komoditas. Jenis komoditas berhubungan dengan jaringan irigasi dalam hal kebutuhan air untuk komoditas tersebut.

C. Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat

1. Perekonomian Masyarakat

Salah satu parameter penting untuk mengetahui ketertinggalan suatu desa yaitu berdasarkan aspek perekonomian masyarakatnya. Aspek ini berkaitan dengan klasifikasi masyarakat berdasarkan kemampuan ekonomi. Berdasarkan standar Badan Pusat Statistik, terdapat 14 kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan rumah tangga miskin, yaitu:

a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m^2 per orang
b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah atau bamboo atau kayu murahan
c. Jenis dinding tempt tinggal dari bamboo atau kayu berkualitas rendah
d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar
e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunkan listrik
f. Sumber air minum berasal dari sumur atau air mata tidak terlindungi
g. Bahan bakar untuk memasak adalah kayu bakar atau arang
h. Hanya mengkonsumsi daging atau ayam atau susu satu kali dalam seminggu
i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam satu setahun
j. Hanya sanggup makan satu atau dua kali dalam sehari
k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan ke puskesmas atau poloklinik
l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500m^2, buruh tani, nelayan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 700.000 / bulan
m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah atau tidak tamat SD atau hanya tamat SD
n. Tidak memiliki tabungan atau barang tang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000 (sepeda motor, emas, hewan ternak).

Untuk mendeskripsikan perekonomian tersebut terdapat beberapa kriteria berdasarkan teori, penelitian terdahulu dan penyesuaian dengan wilayah studi. Beberapa kriteria untuk mendeskripsikan perekonomian masyarakat, yaitu:

a. Jenis mata pencaharian. Mata pencaharian merupakan aktivitas manusia untuk memperoleh taraf hidup yang layak dimana antara daerah yang satu

dengan daerah lainnya berbeda sesuai dengan taraf kemampuan penduduk dan keadaan demografinya.

b. Tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan berkaitan dengan besarnya pendapatan yang diperoleh masyarakat dalam suatu kurun waktu tertentu.

c. Intensitas menabung. Intensitas menabung berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk menyisihkan penghasilannya untuk ditabungkan di instansi penyimpanan uang seperti koperasi atau bank.

d. Jenis pengeluaran. Jenis pengeluaran berkaitan dengan penggunaan penghasilan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan ketertinggalan suatu desa. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan, sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan juga dapat mempengaruhi kesejahteraan. Dalam penelitian ini tingkat pendidikan dilihat dari pendidikan terakhir dari masyarakat.

3. Produktifitas Masyarakat

Produktifitas berkaitan dengan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Dalam pembahasan ini, produktifitas masyarakat diartikan sebagai kemampuan masyarakat untuk menghasilkan sesuatu pada usia tertentu. Berdasarkan Panduan Identifikasi Desa Terpencil, Desa Tertinggal, dan Pulau-pulau Kecil, produktifitas masyarakat dapat dideskripsikan melalui jumlah pengangguran masyarakata pada usia produktif (15-64 tahun).

2.3 Tinjauan Analisis

2.3.1 Analisis Faktor

Analisis faktor merupakan cara pendekatan regionalisasi yang digunakan untuk mengisolasi faktor-faktor dasar yang diinginkan dalam suatu wilayah yang dipelajari dan mengelompokan wilayah-wilayah berdasarkan faktor *loadings* atau variabel-variabel yang mempunyai sifat menonjol yang berperan di dalam wilayah tersebut. Metode analisis faktor merupakan salah satu analisis ketergantungan antar variabel yang sifatnya multivariate.

Analisis faktor digunakan dengan tujuan untuk menyederhanakan beberapa variabel yang diteliti menjadi sejumlah faktor yang lebih sedikit dari jumlah variabel yang diteliti sebelumnya (Hendriyadi, 2014). Dari analisis faktor terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh, yaitu:

1. Mereduksi variabel menjadi variabel baru yang jumlahnya lebih sedikit.
2. Mempermudah interpretasi hasil analisis, sehingga mendapatkan informasi yang realistis dan sangat berguna.
3. Pemetaan objek berdasarkan karakteristik yang terkandung dalam faktor
4. Pemeriksaan validitas dan realibilitas

Langkah-langkah anaisis faktor dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perumusan masalah

   Langkah ini menjelaskan tujuan dari penelitian dengan menggunakan analisis faktor yaitu mengidentifikasi struktur data dan mereduksi dimensi data. Struktur kumpulan data akan dilihat dari matriks korelasi atau kovarian. Selanjutnya menentukan variabel-variabel yang akan diteliti. Merumuskan masalah meliputi beberap hal:

   a. Tujuan analisis faktor harus diidentifikasi
   b. Variabel yang akan digunakan dalam analisis faktor harus dispesifikasi berdasarkan penelitian sebelumnya, teori, dan pertimbangan dari peneliti.
   c. Pengukuran variabel berdasarkan skala interval atau rasio
   d. Banyaknya elemen sampel (n) harus cukup atau memadai

2. Uji independensi variabel dalam matriks korelasi

   Uji ini dilakukan dengan menghitung nilai *Kaiser-Maiyer Olkin* (KMO), *Barlett Test of Sphericity*, *Measure of sampling Adequancy* (MSA), dan *Communalities*. Jika nilai KMO < dari 0,50 dapat disimpulkan bahwa teknik analisis faktor tidak tepat digunakan, sedangkan apabila semakin tinggi nilai skor semakin baik penggunaan model analisis faktor.

   Barlett Test of Sphericity digunakan untuk menguji hipotesis nol bahwa variabel tidak berkorelasi didalam populasi. Populasi mastriks korelasi merupakan matriks identitas. Signifikansi yang tinggi (p<0,000), memberi implikasi bahwa matriks korelasi cocok untuk analisis faktor.

Variabel-variabel yang layak untuk dibuat analisis faktor dalam matriks korelasi dilakukan uji *Measure of Sampling Adequacy* (MSA), yang dapat dilihat pada tabel *Anti-image Matrices*. Nilai ini dilihat dari angka-angka yang diberi tanda 'a' yang membentuk garis diagonal. Angka-angka tersebut merupakan besaran nilai MSA variabel. Variabel yang layak untuk dianalisis faktor harus memiliki nilai MSA > 0,5, artinya analisis faktor memang tepat untuk menganalisis data dalam bentuk matriks korelasi. Hasil nilai MSA pada perhitungan angka MSA berkisar antara 0 dan 1, jika:

a. MSA = 1, berarti variabel tersebut dapat diprediksi tanpa kesalahan oleh variabel yang lain.
b. MSA > 0,5, berarti variabel masih bisa diprediksi dan bisa dianalisis lebih lanjut.
c. MSA < 0,5, berarti variabel tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dianalisis lebih lanjut atau dikeluarkan dari variabel lainnya.

3. Ekstraksi faktor dalam analisis faktor

   Terdapat sejumlah teknik atau metode untuk melakukan ekstraksi dalam analisis faktor yaitu *Principal Component Analysis* (PCA), dan *Common Factor Analysis*. Metode PCA, jumlah varian dalam data dipertimbangkan. PCA direkomendasikan apabila hal yang pokok ialah penentuan banyaknya faktor harus minimum dengan memperhitungkan varian maksimum dalam data. Faktor-faktor tersebut dinamakan *principal component*. Metode *common factor analysis*, faktor diestimasi hanya didasarkan pada *common varriance dan communalities* dimasukkan dalam matriks korelasi. Metode ini dianggap tepat apabila tujuan utamanya ialah mengenali/ mengidentifikasi dimensi yang mendasari dan *common variance* yang menarik perhatian. Metode ini juga dikenal sebagai *principal axis factoring*. Dalam studi ini penentuan analisis faktor akan dilakukan dengan teknik PCA.

4. Ekstraksi faktor awal dan rotasi

   Analisis faktor akan menghasilkan ekstraksi faktor sejumlah varibel yang akan digunakan dalam analisis faktor. Setiap faktor yang terbentuk akan memiliki tingkat kemampuan untuk menjelaskan keragaman total yang berbeda.

Kemampuan ini ditonjolkan oleh nilai eigen, sedangkan dalam bentuk persentase dapat dibaca persentase dari keragaman. Apabila jumlah variabel yang ada berjumlah lebih dari 20, nilai eigen > 1 dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan jumlah faktor pertama, yang akan digunakan jika persentase keragaman kumulatif, telah mencapai sekurangnya 60%. Selanjutnya diteruskan dengan interpretasi terhadap variabel-variabel yang mewakili sebuah faktor berdasarkan nilai *loading*/ pembobot (skor komponen). Nilai loading tersbut mewakili nilai koefisien korelasi antara faktor dengan variabel.

5. Interpretsi Faktor

   Interpretasi dipermudah dengan mengenali variabel yang muatannya besar pada faktor yang sama. Faktor tersebut kemudian bisa diinterpretasikan, dinyatakan dalam variabel yang mempunyai muatan yang tinggi padanya. Variabel yang berkorelasi kuat (nilai muatan faktor yang sama besar) dengan faktor terntentu akan memberikan inspirasi nama faktor yang bersangkutan.

2.3.2 *Analytic Hierarchy Process* (AHP)

AHP adalah struktur teknik untuk mengorganisir dan menganalisis keputusan yang kompleks. Menurut Saaty (1993), AHP didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif.

Adapun langkah-langkah dalam melakukan metode AHP yaitu:

1. Definisikan persoalan dan rinci permasalahan yang diinginkan.
2. Struktur hierarki dari sudut pandang manjerial menyeluruh (dari tingkat-tingkat puncak sampai ke tingkat dimana dimungkinkan campur tangan untuk memecahkan persoalan itu)
3. Membuat sebuah matriks banding berpasangan untuk kontribusi atau pengaruh setiap elemen yang relevan atas setiap kriteria yang berpengaruh yang berada setingkat di atasnya. Dalam matriks ini, pasangan-pasangan elemen dibandingkan berkenaan dengan suatu kriteria di tingkat yang lebih tinggi. Dalam membandingkan dua elemen kebanyakan orang lebih suka memberi suatu pertimbangan yang menunjukkan dominasi sebagai suatu bilangan bulat.

4. Mendapatkan semua pertimbangan yang diperlukan untuk mengembangkan perangkat matriks di langkah 3.
5. Setelah mengumpulkan semua data banding berpasangan dan mengumpulkan nilai-nilai kebalikannya beserta entri bilangan 1 sepanjang diagonal utama, prioritas dicari dan konsistensi diuji.
6. Laksanakan langkah 3, 4 dan 5 untuk semua tingkat dan gugusan dalam hierarki.
7. Menggunakan komposisi secara hierarkis (sistesis) untuk membobotkan vektor-vektor prioritas itu dengan bobot kriteria-kriteria dan jumlahkan semua entri prioritas terbobot yang bersangkutan dengan entri prioritas dari tingkat bawah berikutnya. Hasilnya adalah vektor prioritas menyeluruh untuk tingkat hierarki paling bawah. Jika hasilnya ada beberapa buah, boleh diambil nilai rata-rata aritmatiknya.
8. Evaluasi konsistensi untuk seluruh hierarki dengan mengalikan setiap indeks konsistensinya dengan prioritas kriteria bersangkutan dan menjumlahkan hasil kalinya. Hasil ini dibagi dengan pernyataan sejenis yang menggunakan indeks konsistensi acak, yang sesuai dengan dimensi masing-masing matriks. Dengan cara yang sama setiap indeks konsistensi acak juga dibobot berdasarkan prioritas kriteria yang bersangkutan dan hasilnya dijumlahkan. Rasio konsistensi hierarki itu harus 10 persen atau kurang.

Untuk mendapatkan matriks perbandingan berpasangan akan diisi berdasarkan skala penilaian perbandingan berpasangan. Menurut Saaty (1993), skala perbandingan berpasangan terdiri dari:

Tabel 2. 1 Tabel Skala nilai perbandingan berpasangan

Intensitas kepentingan	Definisi	Penjelasan
1	Kedua elemen sama pentingnya	Dua elemen menyumbangkan sama besar pada sifat itu
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen lainnya	Pengalaman dan pertimbangan sedikit menyokong satu elemen daripada elemen lainnya
5	Elemen yang satu esensial atau sangat penting daripada yang lainnya	Pengalaman dan pertimbangan dengan kuat menyokong satu elemen atas elemen yang lainnya
7	Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya	Satu elemen dengan kuat disokong dan dominannya telah terlihat dalam praktik
9	Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya	Bukti yang menyokong elemen yang satu atas yang lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan

Intensitas kepentingan	Definisi	Penjelasan
2,4,6,8	Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan-pertimbangan yang berdekatan	Kompromi diperlukan antara dua pertimbangan
Kebalikan	Jika untuk aktifitas i mendapat satu angka bila dibandingkan dengan aktifitas j, maka j mempunyai nilai kebalikanya bila dibandingkan dengan i	

Sumber: Saaty, 1993

2.4 Tinjauan Kebijakan Pengembangan Desa

Penanganan desa tertinggal dapat dilakukan dengan pelaksanaan program pembangunan dalam rangka pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan dan penanggulangan keterbelakangan masyarakat dalam suatu daerah. Berdasarkan Panduan Identifikasi Desa Terpencil, Desa Tertinggal, dan Pulau-pulau Kecil tahun 2007, yang disusun oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, untuk mengatasi permasalahan desa tertinggal berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang telah dilakukan sebelumnya, diindikasikan beberapa bentuk program penanganan antara lain:

A. Program penyediaan prasarana dasar wilayah
   1. Pemerataan ketersediaan listrik
   2. Pemerataan ketersediaan air
   3. Pemerataan ketersediaan jaringan irigasi
   4. Pemerataan jaringan jalan

B. Program penyediaan sarana wilayah
   1. Penyediaan sarana ekonomi
      a. Pasar
      b. Pertokoan
      c. Perkantoran
      d. Pedagang kaki lima
   2. Penyediaan sarana industri
      a. Rumah tangga
      b. Industri menengah
      c. Industri besar

3. Penyediaan sarana kesehatan
   a. Rumah sakit
   b. Puskesmas
   c. Puskesmas pembantu
4. Penyediaan sarana pendidikan
   a. Sekolah dasar
   b. Sekolah menengah pertama
   c. Sekolah menengah atas
5. Penyediaan sarana transportasi
   a. Terminal
   b. Stasiun

C. Program peningkatan perekonomian masyarakat

Pengelolaan potensi ekonomi rakyat dan sumber daya alam secara optimal bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukan oleh peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. Kegiatan prioritas pengelolaan potensi ekonomi rakyat dan sumber daya alam secara optimal adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat
2. Memprioritaskan pembangunan infrastruktur, dengan pendekatan padat karya
3. Memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana penunjang ekonomi dengan alternatif USO (U*niversal Service Obligation*) untuk telekomunukasi, keperintisan untuk tansportasi, dan listrik masuk desa dengan pendekatan proyek padat karya
4. Meningkatkan modal sosial yang ada dalam masyarakat;
5. Mendorong investasi swasta dan asing pada potensi karakteristik daerah
6. Meningkatkan akses masyarakat dan usaha mikro, kecil, dan menengah kepada permodalan, pasar, informasi, dan teknologi;
7. Penguatan dan penataan kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat.

D. Program peningkatan pendidikan masyarakat program pembangunan peningkatan kualitas sumber daya manusia (sdm)

1. Penyediaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yaitu:
   a. Pendirian SD kecil dan fasilitas sarana di daerah-daerah terpencil yang secara geografis sulit dijangkau

b. Perbaikan bangunan sekolah

c. Pengadaan buku pelajaran dan alat peraga.

2. Peningkatan kualitas dan kualifikasi guru
3. Penuntasan Wajib Belajar 9 tahun baik melalui pendidikan formal dan pendidikan luar sekolah
4. Mempercepat pemberantasan buta aksara dengan menyelenggarakan pendidikan keaksaraan fungsional

E. Program peningkatan produktivitas masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan produktivitas ketenagakerjaan dilaksanakan melalui kegiatan melalui kegiatan prioritas

1. Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja dengan prioritas:
   a. Mengadakan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan tenaga kerja
   b. Peningkatan penyusunan dan penyebarluasan informasi pasar kerja
   c. Memfasilitasi pengiriman tenaga kerja antar daerah maupun antar negara
2. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan prioritas:
   a. Pengembangan pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan
   b. Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja
3. Perlindungan tenaga kerja dengan prioritas berupa:
   a. Peningkatan hubungan pengusaha dengan tenaga kerja
   b. Perlindungan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

2.5 Studi Terdahulu

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Publikasi	Variabel	Wilayah Sudi	Tujuan	Metode Analisis	Keterangan
1.	Wirda Rahmania (2007)	Pengembangan Desa Pedagangan sebagai Desa Tertinggal di Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo.	Skripsi	• Sarana • Prasarana • Sosial ekonomi • Strategi pengembangan dan konsep	Desa Pedagangan Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo	• Mengidentifikasi karakteristik Desa Pedagangan • Mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan ketertinggalan desa • Menyusun strategi dan konsep pengembangan	Analisis deskriptif: • Analisis karakteristik desa Analisis evaluatif: • Analisis tingkat pelayanan fasilitas • Analisis ketertinggalan desa • Analisis faktor • Analisis potensi dan masalah • Analisis akar masalah Analisis development: • Analisis SWOT, IFAS EFAS, Strategi dan konsep	Persamaan: Mengkaji tentang daerah tertinggal, menggunakan analisis faktor Perbedaan: Wilayah studi tujuan, variabel dalam analisis faktor dan metode analsisi yang digunakan berbeda.
2.	Tantri Ayu Dewani (2006)	Arahan Pengembangan Desa Tertinggal di Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo.	Skripsi	• Karaktersitik fisik desa tertinggal • Karakteristik perekonomian desa tertinggal • Karakteristik social budaya desa tertinggal • Tipologi wilayah • Aspek geo politik • Aspek Ekonomi • Aspek Sosial Budaya • Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman • Arahan pengembangan	Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo	• Mengidentifikasi karakteristik Desa Pedagangan • Mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan ketertinggalan desa • Menyusun strategi dan arahan pengembangan	Analisis deskriptif evaluative Analisis development	Persamaan: Mengkaji tentang daerah tertinggal, menggunakan analisis faktor Perbedaan: Wilayah studi tujuan, variabel dalam analisis faktor dan metode analsisi yang digunakan berbeda.

Tabel 2.2 menjelaskan mengenai penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini. Adapun referensi yang digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya yaitu:

1. Pengembangan Desa Pedagangan sebagai Desa Tertinggal di Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo.

   Penggunaan studi terdahulu ini sebagai referensi yaitu mengetahui variabel yang digunakan untuk mengidentifikasi karaktersitik wilayah studi yang terdiri dari variabel sarana, prasarana dan sosial ekonomi. Variabel tersebut akan digunakan peneliti untuk mengidentifikasi karaktersitik wilayah studi dan sebagai input untuk mengetahui tipologi Desa Tarokan.

2. Arahan Pengembangan Desa Tertinggal di Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo.

   Penggunaan studi terdahulu ini sebagai referensi yaitu mengetahui metode analisis yang digunakan. Peneliti juga menjadikan variabel yang termasuk dalam karaktersitik fisik desa tertinggal berupa kondisi geografis sebagai variabel untuk analisis faktor.

2.6 Kerangka Teori

Kerangka teori digunakan untuk menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan penelitian. Untuk rumusan masalah pertama peneliti menggunakan teori atau kebijakan yang berasal dari undang-undang dan peraturan pemerintah, untuk rumusan masalah kedua peneliti menggunakan peraturan pemerintah dan studi terdahalu, sedangkan untuk rumusan masalah ketiga peneliti menggunakan kebijakan dari peraturan pemerintah sebagai input untuk arahan pengembangan.

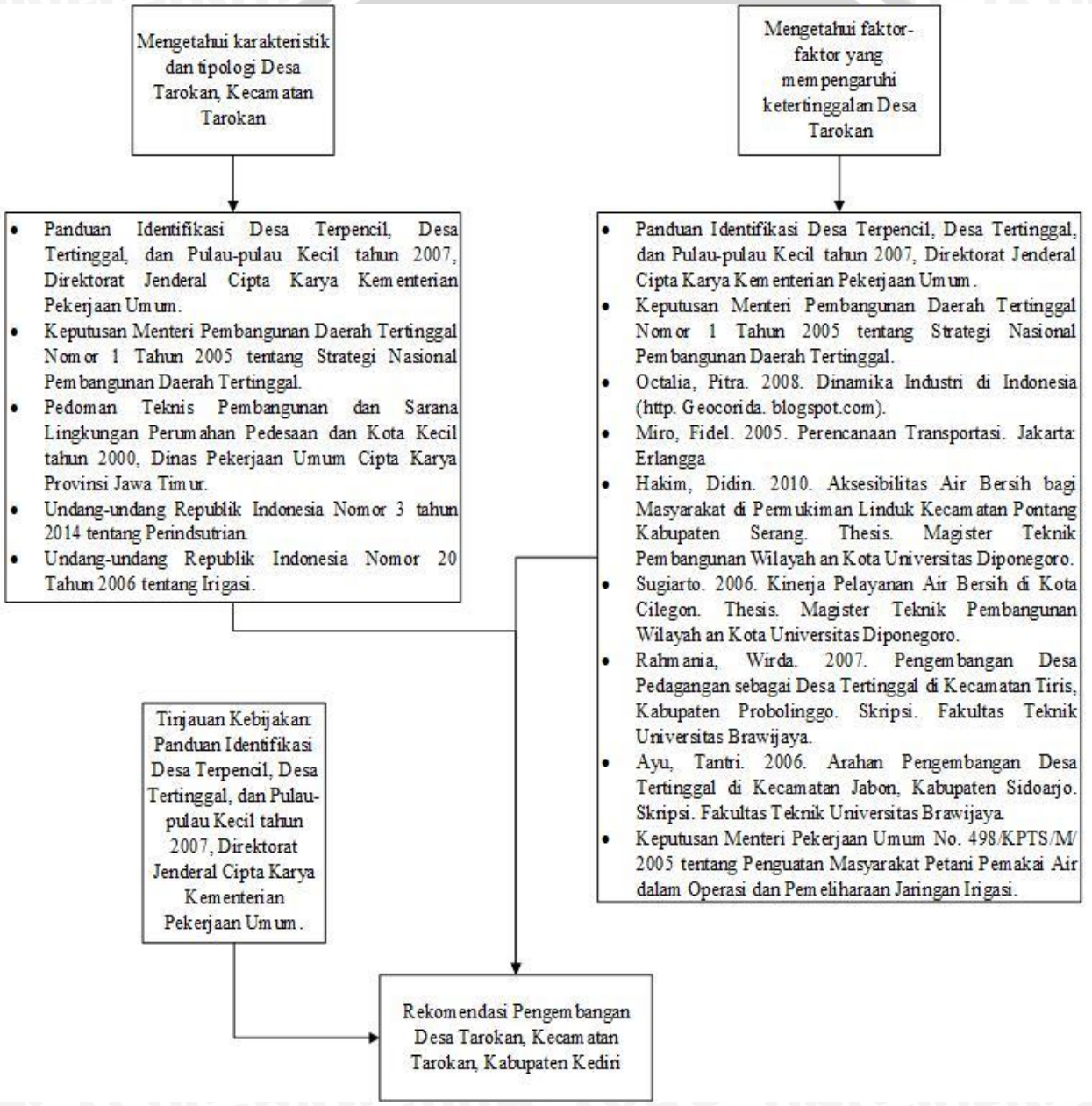

Gambar 2. 1. Kerangka Teori